

SKRIPSI
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BKAD) PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2022**

*The Influence Of The Implementation Of The Regional Financial
Management Information System (Simda) On The Quality Of Financial
Reports In The Regional Financial And Asset Agency (Bkad) Of The Majene
District Government Year 2022*



NUR AULIA RACHMAN

C0118028

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2023**

ABSTRAK

Nur Aulia Rachman, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset (BKAD) Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, “Di Bimbing Oleh Wulan Ayuandiani Dan Akbar Azis”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene dengan jumlah sampel 40. Pengambilan sampel di lakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesione/angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbarui dengan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.25/1999 yang diperbarui dengan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kacamata akuntansi sektor publik, paling tidak terdapat tiga permasalahan utama mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan. Salah satunya yaitu belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan

pengendalian internal pemerintah daerah. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak memadai maka suatu barang tentu sistem pencatatan dan pelaporannya kurang handal. Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, maka deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah telah memfasilitasi pemerintah daerah dengan aplikasi, dimana aplikasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan aplikasi ini adalah SIMDA, (Septarini dan Papihaya, 2016).

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Triandhini (2018), mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dengan pemanfaatan daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian kewenangan ini disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Pujanira dan Taman, 2017). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan disuatu daerah Yusup,(2016).

Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2020).

Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan data keuangan organisasi pemerintah daerah, perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor

yang melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi yang bersifat komputer. Mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA) mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan) guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi client, server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. Namun menurut (Devi,2020) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan

penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi pemda secara maksimal.

Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan selalu berpedoman pada standar yang ditentukan. Mengacu dengan amanat UU No.17 tahun 2013 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan nomor 24 tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. PP No.71 tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan.

Pemerintah kabupaten Majene adalah salah satu pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi, yang relevan, handal, dapat dipahami dan dibandingkan. Laporan pemerintah daerah setiap bulan akan mendapat penilaian auditor dari pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini audit.

Egit gunadi (2017), yang melakukan penelitian pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten gowa menemukan hasil penelitian bahwa, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gowa. Sedangkan Dewi (2018), yang melakukan penelitian pada pemerintah kota pariaman menemukan bahwa pada umumnya pegawai memiliki, memahami pengertian SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya terkait dengan data masukan dan keluaran. Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi SIMDA *finance* ini SIMDA cepat kadaluwarsa, jaringan *offline* sering, tidak ada dokumentasi tentang diagram alur ringkasan yang menunjukkan data arus kas, sistem manajemen data yang lemah, prosedur untuk melihat data insidental masih terlalu lama, ruangan kantor yang masih kurang memadai serta terjadinya *human error*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan aplikasi SIMDA ini dapat membantu peningkatan kualitas laporan keuangan, karena membantu dalam proses penyajian laporan keuangan yang efisien, tepat waktu, serta transparansi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mohune (2018), pengaruh penerapan sistem informasi daerah dengan hasil pengujian hipotesis koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena aplikasi SIMDA merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bidang Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan konsep yang erat hubungannya dengan konsep Sistem Informasi Manajemen Daerah.

Serta dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam pengembangan teori untuk penelitian dengan tema dan cakupan yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi pemerintah daerah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai masukan pada pemerintah sebagai pedoman kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Bagi akademik dan masyarakat sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah secara informasi dalam menunjang penelitian dimasa yang akan datang. Khususnya dalam masalah Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah.
3. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis. Khususnya mengenai pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, serta untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana(S1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen

2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. SIM juga sangat bermanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari SIM ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

2.1.1.2 Tugas Sistem Informasi Manajemen

a. Pengumpulan Data

Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam sim.

b. Penyimpanan Data

Data yang terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera di proses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer.

c. Pemrosesan Data

Pemrosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahli. Bila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidental dapat dimanfaatkan, bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer.

d. Pemrograman Data

Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar komputer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang digunakan. Pekerjaan inilah yang disebut pemrograman, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidang komputer.

2.1.1.3 Fungsi Sistem Informasi Manajemen

- a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengahruskan adanya perantara sistem informasi.
- b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.

- f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru.
- g. Memperbaiki produktifitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- h. Mengolah transaksi-transaksi, mmengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.
- i. Megolah dokumen-dokumen transaksi yang terjadi.

2.1.2 Sitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

2.1.2.1 Definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan disetiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Aplikasi ini dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan aplikasi SIMDA merupakan salah

satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya Darman syarif (2015).

2.1.2.2 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Berikut beberapa fungsi aplikasi SIMDA keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic data processing (EDP) audit.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu alat untuk menganalisis laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan. Adanya analisis laporan keuangan tersebut, maka perusahaan dapat mengevaluasi kembali modal yang akan dipakai dalam mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya. Analisa laporan keuangan juga bisa diartikan proses untuk mempelajari data-data historis keuangan (historical review) agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga analisa laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat dilakukan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus kas dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan (Sulandri, 2016).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban ataskepengurusn sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Rudini, 2018). Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat SAK No.1, Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Tujuan laporan keuangan sangat penting bagi pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang standar akuntansi pemerintah indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

2.1.3.3 Bentuk Laporan Keuangan

Ada dua jenis bentuk laporan keuangan yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan yaitu sebagai berikut :

- a. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan saat tertentu

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba/rugi adalah laporan keuangan yang membarikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah. Diindonesia, Laporan Keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2013 tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Defenisi kualitas menurut Eliana (2017) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sedangkan menurut Ikriyati (2019) defenisi laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ttelah ditetapkan secara periodik, dan manajemen

yaitu membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan sangat penting bagi pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Kriteria tersebut diatas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara Eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Tinjauan Empirik

Beberapa hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
01.	Ridwan (2019)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan) Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Daerah Indramayu)	Metode kuantitatif	Temuan penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi SIMDA keuangan tersebut	Peneliti terdahulu melakukan penelitian aplikasi SIMDA keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Indramayu, sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian pada BKAD Kabupaten Majene.	Peneliti terdahulu, dengan peneliti sekarang dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif
02.	Bagoe (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo)	Metode kuantitatif	Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas keuangan daerah pada DPPKAD kota gorontalo	Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap pengelolaan terhadap efektivitas keuangan daerah dan melakukan penelitian DPPKAD kota gorontalo, sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian aplikasi SIMDA pada	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kuantitatif

					BKAD kabupaten majene.	
03.	Megawati mohune (2018)	Metode kuantitatif	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo	Terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan di pemda gorontalo	Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian pada bidang keuangan dan aset daerah	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif
04.	Nugraha (2015)	Metode kuantitatif	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten	Dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena aplikasi SIMDA merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan daerah.	Peneliti melakukan penelitian pada organisasi pemerintah daerah yaitu pada dinas kesehatan kabupaten nganjuk sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian pada BKAD kabupaten majene	Peneliti dahulu menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif

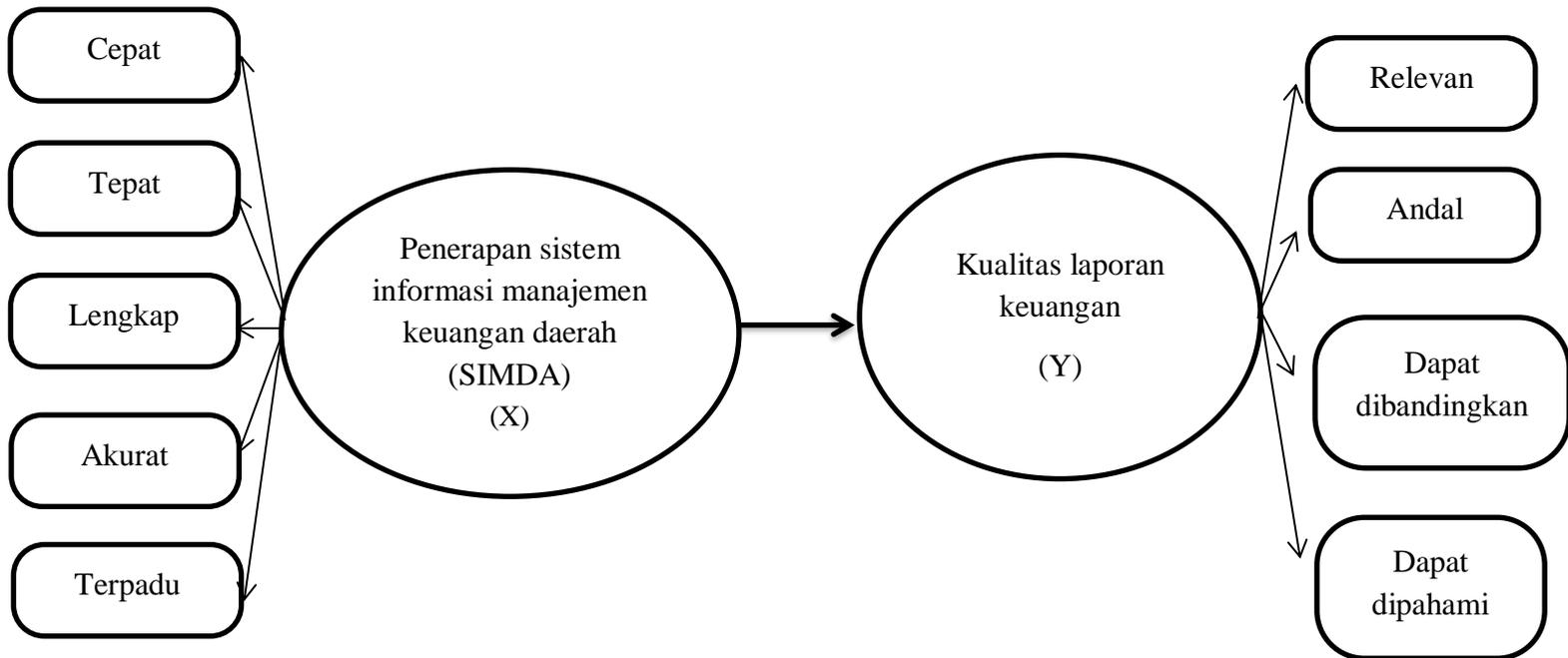
			Nganjuk)			
05.	Erwin (2016)	Metode kuantitatif	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah(SIM DA), Sistem Pengendalia n Intern, Kompetensi Aparatur Dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintah n Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Wilayah Maluku Utara	Hasil penelitian menunjukka n variabel penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), sistem pengendalia n intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang disebabkan yakni kondisi kompetensi aparatur yang masih	Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur dan ketaatan standar akuntansi pemerintah kabupaten/ko ta wilayah maluku utara sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian pada aplikasi SIMDA pada BKAD kabupaten majene	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang mengguna kan metode penelitian yang sama dengan mengguna kan metode kuantitatif

				rendah karena tidak berlatarbelakang akuntansi, pemahaman SAP, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.		
06	Meiname Asnawi, et al (2019)	Metode kuantitatif	Pengaruh Implementasi System Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan System Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan <u>Keuangan</u> Daerah	Menunjukkan bahwa implementasi system informasi manajemen keuangan daerah (X1) memiliki 2845 dengan tingkat signifikan 0,006, kualitas sumber daya manusia (X2) memiliki 3084 dengan 0,003 tingkat signifikan, aplikasi standar akuntansi (X3)	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki perbedaan dalam melakukan penelitian yaitu peneliti terdahulu menggunakan 3 variabel dalam penelitiannya	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kuantitatif
07	Torang P.	Metode kuantitatif	Pengaruh Penerapan Sistem	Hasil penelitian menggunakan	Peneliti terdahulu dengan	Peneliti terdahulu dengan

	Simanjuntak (2019)		Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo	an analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) berpengaruh	peneliti sekarang melakukan penelitian ditempat yang berbeda	peneliti sekarang memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana
08	Andi Afrizal (2019)	Metode kuantitatif	Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara independen (aplikasi simda) secara parsial terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan)	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang melakukan penelitian dengan tempat yang berbeda	Peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang menggunakan metode yang sama yaitu metode kuantitatif

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan penelitian empiris yang telah dikemukakan diatas untuk mengetahui kerangka berpikir mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022”**, Maka dapat digambarkan dalam bagian kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat, hipotesis dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Penerapan SIMDA keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten majene.

H1 : Penerapan SIMDA keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten majene

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, dikarenakan peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene.

3.2 Jenis data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (Angket Penelitian) kepada objek yang akan diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2014). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majene sebanyak 111 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiyono (2014). Penelitian ini terdiri dari entitas akuntansi atau keuangan yang di lingkungan pemerintah kabupaten majene, yang akan dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah BKAD (Badan Keuangan Dan Aset Daerah) dalam BKAD ada 40 orang pegawai yang akan diberikan kuesioner. Tiap pegawai ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden tersebut adalah:

1. Pegawai bagian akuntansi atau keuangan yang bekerja lebih dari satu tahun.
2. Pegawai yang telah menggunakan aplikasi SIMDA lebih dari satu tahun.
3. Pegawai yang turut serta dalam penyusunan laporan keuangan kabupaten majene.

2	Penyusunan proposal		■						
3	Seminar proposal			■					
4	Pengumpulan data				■				
5	Analisis data					■			
6	Penyusunan skripsi						■		
7	Bimbingan skripsi							■	
8	Ujian persepsi								■
9	Ujian tutup								■

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu variabel baik yang dibentuk sebagai variabel independen, variabel dependen, yang sesuai kebutuhan hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi kemudian ditarik kesimpulannya, variabel dalam penelitian adalah :

a. Variabel independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negative, dalam *script analysis* akan terlihat bahwa variabel yang menjelaskan bahwa jalan atau cara sebuah masalah dipecahkan adalah tidak lain dari variabel-variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

SIMDA keuangan

SIMDA keuangan adalah suatu sistem informasi yang dibangun dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja komputer

b. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah suatu tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel yang dijelaskan atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y) kualitas laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana publik yang sesuai dengan standar dan diukur dengan berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

3.5.2 Definisi Operasional

Tabel 3.3 definisi operasional variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Kegunaan produk SIMDA Dalam pengelolaan keuangan secara terintegrasi	1. Cepat 2. Tepat 3. Lengkap 4. Akurat 5. Terpadu
2	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan lengkap yang memberikan informasi relevan andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami oleh pengguna laporan keuangan.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dipahami 4. Dapat Dibandingkan

3.5.3 Pengukuran

Jenis alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuisioner yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan responden tentang yang mereka alami dan mengetahuinya.

Adapun skala yang digunakan peneliti dalam instrumen ini adalah skala likert. Menurut (Sugiyono, 2017), skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Untuk menganalisa secara kuantitatif, setiap jawaban diberi bobot atau skor. Jawaban setiap pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif.

Jenis pernyataan pada skala penelitian ini menggunakan pernyataan *favorable* yaitu pertanyaan yang memihak atau mendukung pada objek penelitian. Menurut (Azwar, 2015) pernyataan *favorable* merupakan pernyataan yang bersifat positif (mendukung) aspek-aspek dalam variabel. Prosedur penilaian butir pernyataan *favorable* diantaranya: Sangat Setuju bernilai 5, Setuju bernilai 4, Kurang Setuju bernilai 3, Tidak Setju bernilai 2, Sangat Tidak Setuju bernilai 1. Berikut ini adalah kriteria penilaian yang digunakan pada skala likert.

Tabel 3.3 Skor Pilihan Jawaban Responden

No	Pilihan	Skor
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4

3	KS = Kurang Setuju	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Angket (Kuisisioner)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Oleh karena itu, jika kata sinonim dari reabilitas yang paling tepat adalah konsisten, maka esensi dari validitas adalah akurasi. Suatu instrument pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

- a. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, kesimpulannya item kuisisioner tersebut valid
- b. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, kesimpulannya item kuisisioner tersebut tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah dalam hal ini kuisisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama.

Misalnya, seseorang yang telah mengisi kuesioner dimintakan mengisi lagi karena kuesioner yang pertama hilang. Isian kuesioner pertama dan kedua haruslah sama atau dianggap sama. Dalam penelitian ini, metode *cronbach's alpha* digunakan untuk menguji reabilitas instrumen angket. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *cronbach' alpha* $> 0,06$ maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reabil.
- b. Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,06$ maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut ada lah tidak reliabel.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi sedehana beberapa syarat yang mesti dipenuhi,(Sugiyono, 2015) yaitu sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak disebut dengan uji normalitas. Untuk mengetahui data yang berdistribusi normal dapat dideteksi menggunakan gambar *p-plot*. Jika gambar *p-plot* menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal, maka data dikatakan berdistribusi normal.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistic yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model prediksi dengan perubahan waktu. Tidak terdapat autokorelasi jika $du < dw < 4 - du$.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan agar dapat mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya varian yang tidak sama terhadap residual untuk semua pengamatan model regresi. Adapun ketentuan pengambilan kesimpulan yaitu titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, kemudian penyebaran titik data tidak boleh berpola gelombang kemudian menyempit, dan penyebaran titik data tidak berpola.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ilmiah serta didukung dengan penelitian terdahulu. Kasus penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif.

3.9.1 Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi pada penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten majene.

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan :

Y = kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

X = Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan

β = Koefisien Regresi

ε = error

3.9.2 Pengujian Hipotesis

3.9.2.1 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika t hitung $>$ t table, dan $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika t hitung $<$ t table, dan $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, berarti sedikit sekali variasi variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1 berarti semakin besar variabel-variabel dependen yang

dapat diterangkan oleh variabel independen jika ternyata dalam perhitungan nilai R^2 sama dengan 0 maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Nur. 2017."Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal) Disusun"
Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta 87(1,2): 149-200
- Afrizal, A. 2019."Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. HJIMB.Vol,1."
- Bagoe, Femi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada DPPKAD Kota Gorontalo), Jurusan Akuntansi.
- Dewi, 2018," Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Pariaman." *Al-Masraf:Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*3(1):63-70
- Erwin, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Sistem Pengendalian Intern, Ompetensi Aparatur Dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Diwilayah Maluku Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Khairun.
- Egit Gunadi, 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Menejemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitaas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa).
- Ermaini, Ade irma, 2021,"*Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*" yogyakarta: Samudra biru.
- Handayani 2010, Analisis Faktor-faktor yang menentukan Efektifitas sistem informasi Akuntansi pada organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2, No.1*
- L,L., Asnawi, M., 2019. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangandaerah. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Aset*, 2(2), 18-38.
- Mulia, Rizki Afri. 2019."Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal EL-RIYASAH* 9(1):7
- Mohune, Megawati. 2018. "Pengaruh Penerapan Sisitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo)". Universitas Gorontalo.
- Nugraha Hamdani Adi, Astuti Yuli Widia, 2015. " Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam Pengolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal Akuntansi Aktual*. Malang. Universitas Negeri Malang
- Pujanira, Abdullah Taman, 2017,"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6(2). Laporan keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bantul)." *Repository Universitas PGRI*
- Ridwan, 2019, Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Ridwan Muhammad, 2021," System Informasi Manajemen" widina bhakti parsadabandung.
- Rosita uli, 2013," PSAK-Penyajian Laporan Keuangan" Jakarta: dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Silvia Almar'atus, Ardiani Ika, Aprih Santoso, 2019," kualitas Laporan Keuangan Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya", Semarang. *Indonesia Accounting*, Vol. 1, Number 2, Year 2019.
- Simanjuntak, T.P. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo. *Jurnal Neraca Agung*. Vol.18.

- Tegela, Ririn. 2014, Pengaruh Penerapan System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi Pada Faultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Triandhini, M. 2018, "Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Mmanajemen Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal universitas muhammadiyah surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprints/69/190>.
- SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 2009, *standar akuntansi keuangan (PSAK)*. Jakarta : salemba empat.
- Sugiyono. 2014 Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi mixed methods. Bandung: Alfabeta.
- Septarini, Dina Fitri, And Frans Papilaya. 2016."Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ." *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 7(2): 100-116.
- Yusup, Maulana. 2016."Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* 10(2): 149-60